

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1.Kajian Pustaka**

##### **2.1.1. Akuntansi Pemerintah**

###### **2.1.1.1.Pengertian Akuntansi**

Pengertian Akuntansi menurut Weygandt, Kimmel & Kieso (2011:7) dalam Ali Akbar Yulianto, Warsilah, Rangga Handika adalah :

“Akuntansi adalah Sistem Informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.”

Sedangkan definisi akuntansi menurut Rahman Putra yang dikutip oleh Suwarjono (2013:2) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi dapat pula didefinisikan sebagai seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi yang bersifat keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan.”

Dari uraian diatas, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa Akuntansi merupakan suatu proses atau seni yang terdiri dari identifikasi. Pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi. Informasi ekonomi yang dihasilkan akuntansi diharapkan berguna dalam pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

### **2.1.1.2. Pengertian Akuntansi Pemerintah**

Menurut Bachtiar Arif dkk. (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai berikut:

“suatu aktivitas pemberi jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.”

Sedangkan menurut Abdul Halim (2002:143) menyebutkan bahwa akuntansi pemerintahan adalah:

“sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.”

Dengan demikian, akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan suatu kegiatan jasa untuk menyediakan informasi yang bersifat keuangan pemerintah guna pengambilan keputusan dari pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah.

## **2.1.2. Standar Akuntansi Pemerintahan**

### **2.1.2.1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan**

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan:

“Standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akruwal dan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal. SAP berbasis Akruwal terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas menuju Akruwal pada Lampiran II berlaku selama transisi bagi entitas yang belum siap menerapkan SAP Berbasis Akruwal. Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akruwal dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa SAP Berbasis Akruwal adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruwal, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban

keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum (Nugraha, 2009).

Standar Akuntansi merupakan pedoman umum atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Apabila tidak ada standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan pengauditan. (Sari, 2013)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun daerah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Standar akuntansi pemerintah dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yaitu Standar Akuntansi Pemerintah diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. (Nurlaila, 2014)

### **2.1.2.2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Indra Bastian (2010:137), yaitu:

“Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.”

Adapun definisi Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya menurut Mahmudi (2011:271), yaitu:

“Standar Akuntansi Pemerintahan berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintahan.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan ini memerlukan pemahaman yang baik dari setiap aparatur yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah beserta instansi-instansinya. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah wajib dilaksanakan, akan tetapi dalam penerapan tersebut perlu dipahami beberapa dasar pemikiran yang penting yang diharapkan dapat membantu penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemikiran tersebut adalah mengenai basis akuntansi yang dianut dan hubungan antara sistem dan

standar. Selanjutnya diikuti proses penyusunan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yang dihubungkan dengan kondisi masing-masing entitas. (Syarah Hidayati, 2016)

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan penentu atas kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Negara dan pelaporan keuangan pemerintahan (Mahmudi, 2011:271).

Dengan diterapkannya SAP, diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (Permana, 2011)

### **2.1.2.3. Kandungan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari :

#### **LAMPIRAN I**

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
  - a) PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
  - b) PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

- c) PSAP 03 Laporan Arus Kas
- d) PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
- e) PSAP 05 Akuntansi Persediaan
- f) PSAP 06 Akuntansi Investasi
- g) PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
- h) PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- i) PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
- j) PSAP 10 Koreksi, Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Estimasi yang Tidak Dilanjutkan
- k) PSAP 11 Laporan keuangan Konsolidasi
- l) PSAP 12 Laporan Operasional.

## LAMPIRAN II

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
  - a) PSAP No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
  - b) PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
  - c) PSAP No 03 tentang Laporan Arus Kas
  - d) PSAP No 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
  - e) PSAP No 05 tentang Akuntansi Persediaan
  - f) PSAP No 06 tentang Akuntansi Investasi
  - g) PSAP No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
  - h) PSAP No 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- i) PSAP No 09 tentang Akuntansi Kewajiban
- j) PSAP No 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
- k) PSAP N0 11 tentang Lpaoran Keuangan Konsolidasian.

PSAP akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan dan daerah berupa :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan maka laporan keuangan pemerintahan pusat atau daerah akan lebih berkualitas (relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami). Laporan keuangan tersebut selanjutnya akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberika opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para *stakeholder* antara lain: Pemerintahan (eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif), *investor*, *kreditor*, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Keuangan Negara.

### **2.1.3. Sistem pengendalian internal**

#### **2.1.3.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pengertian sistem pengendalian internal prmerintah adalah sebagai berikut:

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Definisi pengendalian inter menurut IAPI (2011), dalam Sukrisno Agoes (2012:100) adalah:

“suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

- a. Keandalan pelaporan keuangan  
Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan kreditor dan para pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesionalisme untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan. Tujuan pengendalian yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini.
- b. Efektivitas dan Efisiensi operasi  
Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan.
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku  
Perusahaan publik, non-publik maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk memenuhi beraga ketentuan hukum da peraturan. Beberapa peraturan ada yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil. Sedangkan yang terkait erat dengan akuntansi, misalnya peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.”

### **2.1.3.2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Disamping itu terdapat sistem lainnya adalah sistem pengendalian ekstern pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan

Inspektorat melalui aparat pengawasan intern pemerintah sedangkan sistem pengendalian ekstern pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga peradilan lainnya.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang baik, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang baik oleh pemerintah, dan penyelesaian atas temuan audit diharapkan akan dapat memperbaiki kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Perbaikan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diharapkan akan berimplikasi pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat meminimalkan praktek korupsi (Sari 2012).

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku (Aryani 2013).

### 2.1.3.3. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal

Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dikutip oleh Darise (2009:302) meliputi lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian resiko (*risk assesment*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), aktivitas pengendalian (*control activities*), dan pemantauan (*monitoring*). Dari kelima komponen sistem pengendalian intern tersebut, komponen lingkungan pengendalian merupakan pondasi untuk keseluruhan komponen. Sedangkan komponen informasi dan komunikasi merupakan saluran (*channel*) terhadap tiga komponen pengendalian lainnya. Mahmudi (2010:20-22) adapun komponen sistem pengendalian internal pemerintah, terdiri atas lima komponen yaitu:

#### 1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Pimpinan instansi dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dalam organisasi secara keseluruhan yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian internal yang sehat. Menurut Indra dalam Herawati (2014) mengatakan bahwa faktor-faktor yang dapat membentuk lingkungan pengendalian pada suatu entitas adalah:

- 1) Penegakkan Integritas;
- 2) Komitmen terhadap Kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Struktur organisasi sesuai kebutuhan;

- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab;
- 6) Kebijakan kepemimpinan SDM yang sehat;
- 7) Peran APIP yang efektif;
- 8) Hubungan kerja yang baik.

### **1. Penilaian Resiko (*Risk Assesment*)**

Menurut Indra dalam Herawati (2014) pelaporan keuangan memiliki tujuan proses identifikasi, menganalisis serta mengelola risiko entitas terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Berawal dengan menetapkan tujuan dari instansi yang jelas dan adanya konsistensi dalam aktivitas atau kegiatan. Tahap selanjutnya dilakukan identifikasi secara efektif dan efisien mengenai risiko yang menghambat pencapaian tujuan yang bersumber dari internal maupun eksternal instansi. Penilaian dari risiko meliputi:

- 1) Identifikasi Resiko;
- 2) Analisis Resiko.

### **2. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)**

Kegiatan Pengendalian adalah kegiatan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Kegiatan Pengendalian terdiri dari:

- 1) Review kinerja instansi pemerintah;

- 2) Pembinaan SDM;
- 3) Pengendalian pengelolaansistem informasi;
- 4) Pengendalian fisik aset;
- 5) Penetapan dan review indikator dan ukuran kinerja;
- 6) Pemisahan fungsi;
- 7) Otorisasi transaksi dan kejadian penting;
- 8) Pencatatan akurat dan tepat waktu;
- 9) Pembatasan akses sumber daya;
- 10) Akuntabilitas sumber daya;
- 11) Dokumentasi sistem pengendalian intern.

### **3. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)**

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Dalam hal ini pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, dengan cara sebagai berikut:

- 1) Sarana Komunikasi;
- 2) Manajemen Sistem Informasi.

#### **4. Pemantauan Pengendalian Intern (*Monitoring*)**

Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern, melalui:

- 1) Pemantauan berkelanjutan;
- 2) Evaluasi terpisah;
- 3) Tindak Lanjut.

#### **2.1.3.4. Tujuan Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mendorong daya efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Adapun tujuan pengendalian internal menurut Azhar Susanto (2013:88) adalah sebagai berikut:

“Tujuan pengendalian internal yaitu untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan dari setiap aktivitas bisnis akan dicapai, untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi perusahaan karena kejahatan, bahaya atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan, penyelewengan dan penggelapan, untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggung jawab hukum telah dipenuhi.”

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal, yaitu:

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Pengamanan aset negara

#### 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, SPIP akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Akibatnya, tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Ini dapat dibuktikan misalnya, melalui laporan keuangan pemerintah yang andal dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

### **2.1.4. Kompetensi Staf Akuntansi**

#### **2.1.4.1. Pengertian Kompetensi**

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 A Tahun 2003 menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:146) kompetensi adalah:

“Suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) yang mencakupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya.”

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:2) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“Kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.”

Dari definisi di atas kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap, dan nilai-nilai pribadi dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan.

#### **2.1.4.2. Karakteristik Kompetensi**

Kompetensi memiliki aspek-aspek tertentu yang mendorong dirinya untuk melakukan kinerja yang optimal, maka dari itu tidak semua aspek-aspek pribadi seseorang merupakan bagian kompetensi. Menurut Mc.Clelland, dkk. Dalam Acmad S. Ruky (2014:123) mengemukakan beberapa jenis karakteristik yang memebentuk sebuah kompetensi, yakni sebagai berikut:

**a. *Knowledge* (Pengetahuan)**

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh seseorang tentang hal spesifik. *Knowledge* (Pengetahuan) adalah sebuah kompetensi yang kompleks. Angka (nilai) hasil yang diperoleh seseorang dalam tes-tes pengetahuan seringkali gagal meramalkan prestasi kerjanya dalam melaksanakan pekerjaan yang sebenarnya karena tes-tes tersebut tidak/belum berhasil mengukur pengetahuan (dan skills) sebagaimana mereka sebenarnya digunakan dalam pekerjaan.

**b. *Skills* (Keahlian/Keterampilan)**

*Skills* adalah kemampuan untuk melakukan sebuah tugas tertentu bersifat fisik atau mental (juga “verbal skills”).

**c. *Motives* (Motif)**

*Motives* (motif) adalah hal-hal yang seseorang secara konsisten selalu dipikirkan atau diinginkan yang kemudian mendorongnya melakukan sebuah tindakan. *Achievement Motivation* menggambarkan bahwa orang-orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan secara konsisten selalu menetapkan sasaran/target yang menantang untuk dirinya sendiri, menerima tanggung jawab untuk mencapainya dan menggunakan umpan baik yang diterima untuk berprestasi lebih baik.

**d. *Traits***

Traits adalah ciri-ciri atau (karakteristik) individu khusus bersifat fisik dan juga emosional (reaksi yang konsisten terhadap situasi-situasi dan informasi).

**e. *Self Concept (Konsep Diri)***

Konsep diri adalah sikap, nilai, dan citra diri yang dimiliki seseorang. Konsep diri terdiri dari:

- **Rasa percaya diri**, yaitu keyakinan seseorang bahwa ia akan bisa berprestasi dalam situasi apapun.
- **Nilai (*Value*)** yang dimiliki seseorang adalah “motif reaktif” yang menentukan “jawaban” seseorang dalam jangka pendek dan terhadap situasi-situasi yang dihadapinya. Bila ia memberi nilai tinggi pada perbuatan “menolong orang” maka ia akan bereaksi cepat bila melihat ada orang yang menurutnya memerlukan bantuan/pertolongan.

### 2.1.4.3. Komponen Kompetensi

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 A

Tahun 2003 menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)
2. Keterampilan (*Skill*)
3. Sikap Perilaku (*Attitude*)

Menurut Hutapea dan Thoha (2008:28) dalam Wenda (2013) mengungkap bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang yang digelutinya

(tertentu), misalnya bahasa komputer. Pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efisiensi perusahaan.

## 2. Keterampilan (*Skill*)

Suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang karyawan dengan baik dan maksimal, misalnya seorang programmer komputer. Disamping pengetahuan dan kemampuan karyawan, hal yang paling perlu diperhatikan adalah sikap perilaku karyawan.

## 3. Sikap Perilaku (*Attitude*)

Pola tingkah laku seseorang karyawan didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila karyawan mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Kompetensi knowledge, skill dan attitude cenderung lebih nyata (*visible*) dan relatif berada di permukaan (*ujung*) sebagai karakteristik yang dimiliki manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan kemauan untuk melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.

## **2.1.5. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

### **2.1.5.1. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengertian Laporan Keuangan menurut PSAK No 1 (2015:2) adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materai penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

Menurut Bastian (2010:9) pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.”

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:21) pengertian kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah proses akuntansi yang terstruktur dalam suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak.

#### **2.1.5.2. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Erlina dan Rasdianto (2013:21) menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan secara umum dan khusus adalah sebagai berikut :

“Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”

“Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara khusus adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.”

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan.

#### **2.1.5.3. Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

- a. Masyarakat
- b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
- d. Pemerintah.

#### **2.1.5.4. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan pokok terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ( Laporan Perubahan SAL )
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Berikut dijelaskan secara rinci masing-masing laporan keuangan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial menurut berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 :

##### **1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi dalam satu periode pelaporan dan juga mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Unsur-unsur penyajian dalam LRA adalah :

- a. Pendapatan LRA

Pendapatan LRA merupakan semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

c. Transfer

Transfer merupakan penerimaan atas pengeluaran dari satu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana pertimbangan dan dana bagi hasil.

d. Surplus/defisit LRA

Surplus/defisit LRA merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja yang ada dalam LRA selama satu periode.

e. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang perlu diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Dalam hal ini terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)

SILPA/SIKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

g. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun dan menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

- a. Saldo Anggaran Lebih;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih akhir.

Selanjutnya rincian unsur-unsur dalam Laporan perubahan saldo Anggaran Lebih terdapat pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

## **2. Neraca**

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Unsur-unsur yang terdapat dalam neraca meliputi :

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah daerah dari peristiwa/kejadian masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan. Aset tersebut diklasifikasi kedalam aset lancar dan aset tidak lancar.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek

c. Ekuitas

Ekuitas dihasilkan dari selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan yang merupakan kekayaan bersih pemerintah.

### **3. Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO dan beban operasional, surplus/defisit non operasional, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO.

- a. Pendapatan LO merupakan hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- b. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban
- c. Surplus/defisit kegiatan operasional merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan.
- d. Kegiatan operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin.
- e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa merupakan penjumlahan atau pengurangan surplus/defisit dari kegiatan operasional dengan kegiatan non operasional.
- f. Pos luar biasa merupakan pendapatan/beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau operasi yang tidak biasa, tidak diharapkan sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- g. Surplus/defisit LO merupakan selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan dan setelah diperhitungkan dengan surplus/defisit dari kegiatan non operasional serta pos luar biasa.

#### **4. Pelaporan Arus Kas**

LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo

kas serta kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris .

- a. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.
- b. Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
- c. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan, baik dalam jumlah maupun komposisi utang dan piutang jangka panjang.
- d. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan seperti penerimaan/pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

## **5. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan ini menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari:

- a. Ekuitas Awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

c. Koreksi yang langsung menambha/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
- Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap

d. Ekuitas akhir

## **6. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai penjelasan atau daftar terinci atas ilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
- b. Informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan dan ekonomi makro.
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan ekjadian-kejadian penting lainnya.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

- f. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, dan
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Suwardjono (2012:101) menyatakan pelaporan keuangan sebagai berikut:

“pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang pada gilirannya akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan social negara. Dalam PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bagian KKAP paragraph 24 disebutkan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.”

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;

- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan pelaksanaan anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, sedangkan yang termasuk laporan finansial adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali laporan arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

#### **2.1.5.5. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Laporan keuangan mengungkapkan informasi yang penting bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2015 No. 1, karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam

laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu sebagai berikut:

1. “Dapat dipahami
2. Relevan
3. Keandalan
4. Dapat diperbandingkan.”

Uraian mengenai kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mempunyai kualitas relevan bila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Peran informasi dalam peramalan dan penegasan, berkaitan satu sama lain. Informasi yang sama juga

berperan dalam memberikan penegasan terhadap prediksi yang lalu, misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan. Informasi posisi keuangan dan kinerja masa lalu sering kali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk lamaran eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Informasi yang relevan harus memenuhi karakteristik materialitas.

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat. Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

### 3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal karakteristik sebagai berikut:

#### a. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut.

#### b. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

d. Pertimbangan sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau

beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral, dan karena itu tidak mempunyai kualitas andal.

e. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan yang tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan area itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

4. Dapat dibandingkan

Informasi termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih baik dari pada

kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

#### **2.1.5.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan menurut Lilis Setyowati (2014) yaitu:

1. “Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia
3. Peran Internal.”

Menurut Bayu Dharma Putra (2015) faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Kompetensi Sumber Daya Manusia
2. Sistem Pengendalian Internal
3. Standar Akuntansi Pemerintahan.”

Menurut I Made Edy Sutawan dkk (2015) faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Stress Kerja
2. Motivasi
3. Sistem Pengendalian Internal

Namun menurut Dewi Andini dan Yusrawati (2015), faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Komponen Sumber Daya Manusia
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bawa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Stress Kerja, dan Motivasi.

### 2.1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti/ ahun	Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian
1.	Hayyuning Tyas Rosdiani (2011)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Laporan keuangan, dan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Sistem Pengendalian Internal, Audit Laporan Keuangan dan <i>Good Corporate Governance</i> sebagai variabel bebas dan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel terikat.	Terdapat pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan
2.	Erma Purwita (2013)	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai variabel bebas dan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel terikat.	Terdapat pengaruh yang signifikan antara Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3.	Ni Luh Nyoman , dkk (2014)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi sebagai variabel bebas dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel terikat	Terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4.	Gumanti, Tri Gita (2016)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variabel bebas dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel terikat	Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

## 2.2. Kerangka Pemikiran

### 2.2.1. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar akuntansi pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yaitu: “Standar Akuntansi Pemerintah, selanjutnya SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Indra Bastian (2010:137) yaitu:

“Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia.”

Selain itu menurut pendapat Deddi Nordiawan (2009:25) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintahan pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu:

“SAP diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintahan pusat dan daerah”

Dengan demikian, dari pemaparan diatas dapat penulis artikan bahwa standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Seluruh instansi daerah dapat mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintahan daerah dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami kepada berbagai pihak dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Erma (2013) meneliti tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah pada BPKAD Kabupaten Kuningan. Hasilnya adalah penerapan penerapan SAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Hal tersebut terjadi karena untuk mencapai tujuan pemerintahan daerah.

Yaitu peningkatan kualitas informasi laporan keuangan pemerintahan daerah dengan prinsip *good governance* untuk mengelola keuangan daerah.

### **2.2.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sistem Pengendalian Intern merupakan seperangkat dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin terjadinya informasi akuntansi perusahaan yang akurat.

Sistem Pengendalian Internal menurut COSO dalam *Internal Control-Integrated Framework* (2013:3) yaitu:

“Pengendalian internal adalah proses, dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, manajemen dan personel lain, yang dirancang untuk providen keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan”.

Sehingga dengan adanya tujuan sistem pengendalian internal bahwa dapat menjaga keandalan pelaporan keuangan, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena sistem pengendalian internal dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi, sehingga akan menghasilkan laporan yang benar, melindungi atau membatasi kemungkinan terjadinya keuangan dan penggelapan-penggelapan, kegiatan organisasi dapat dilaksanakan dengan efisien.

Hayyuning Tyas Rosdiani (2011) melakukan pengujian untuk mengukur sejauh mana pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan. Hasilnya bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Hal itu karena dengan pengendalian internal dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi dan akan menghasilkan laporan yang benar, dan membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan.

Sistem Pengendalian Internal menjamin terjadinya informasi akuntansi perusahaan yang akurat. Info akuntansi perusahaan tersebut akan dapat relevan, andal, dan dapat dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya sistem pengendalian internal dalam menjamin kualitas laporan keuangan.

### **2.2.3. Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Azhar, 2007).

Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, proses

penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut. (Ni Luh Nyoman , dkk, 2014)

Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah pada SKPD Kabupaten Buleleng. Hasilnya adalah kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Apabila dalam kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan, maka sumber daya manusia yang dimaksud adalah staf akuntansi yang ebrkompeten dan mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

#### **2.2.4. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem**

##### **Pengendalian Internal, dan Kompetensi Saf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Dearah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat

memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevansi, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

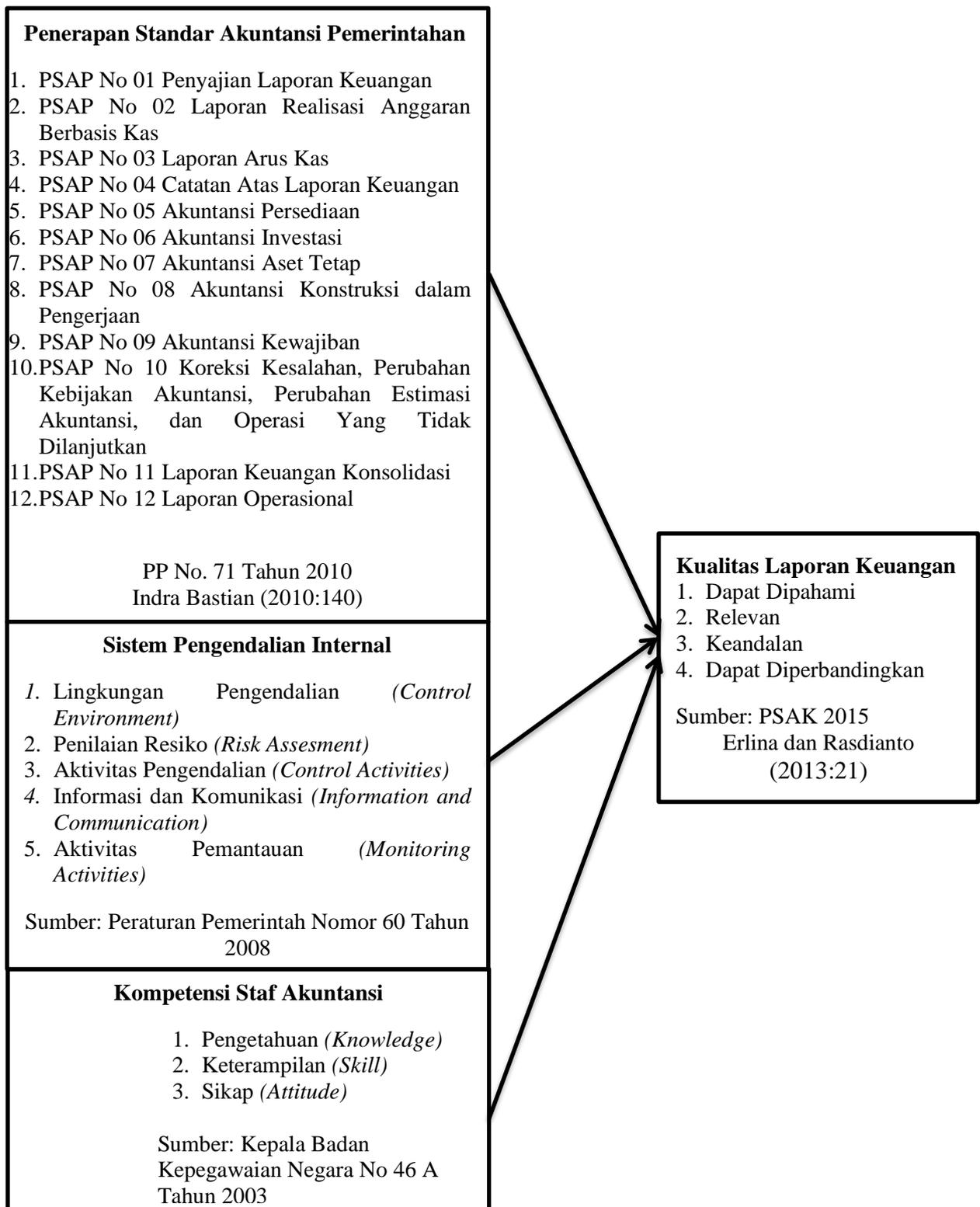
Untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang relevan, andal dan dapat dipercaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang andal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang andal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. (Mardiasmo, 2004)

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dipengaruhi oleh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu: “Standar Akuntansi Pemerintah, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Dengan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan di lingkungan pemerintahan maka diyakini akan berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintahan (Sony Pradipta, 2015)

Selain sumber daya manusia, hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pengendalian internal. Pengendalian pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas, karena pegawai yang memiliki

kompeten yang baik dapat melaksanakan tugas dan bertanggungjawab atas pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya (Yunita, 2015). Menurut Spencer dan Spencer di dalam Emmyah (2009), menguraikan lima karakteristik yang membentuk kompetensi yaitu: 1. Pengetahuan, 2. Keterampilan, 3. Konsep Diri dan Nilai-Nilai, 4. Karakteristik Pribadi, dan 5. Motif.



Gambar 2.1

## Paradigma Penelitian

### 2.3. Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2014:93) berpendapat bahwa yang dimaksud hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum dijawab yang empirik.”

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung

Hipotesis 2: Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hipotesis 3: Kompetensi Staf Akuntansi memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hipotesis 4: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan